

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGANDAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)



Oleh:
GERRY ARMANDO
02160/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
WISUDA PERIODE MARET 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)

GERRY ARMANDO

02160/2008

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing**

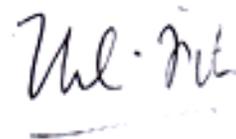
Padang,2013

Pembimbing I



DR. H. Efrizal Syofvan, SE, M.Si, Ak
19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
19740706 199903 2 002

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

(Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)

Gerry Armando

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : gerryarmando3@gmail.com

Abstrak

Kota Bukittinggi sebagai ibukota Kabupaten Agam, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak memenuhi karakteristik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Nilai informasi laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah. Penulis ingin mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan data primer. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen serta pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Setelah data dianalisis, ditemukan bahwa semua faktor di atas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar mempunyai nilai informasi.

Kata kunci: nilai informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah,.

Abstract

Bukittinggi as the capital city of Agam, based on the results of the Local Government Financial Reports Fiscal Year 2008 to 2011 received opinions Wajar Dengan Pengecualian. The results of this examination caused by Government Financial Statements did not complete the value of characteristics information from the financial statements it self. The value of government financial report information is influenced by several factors: the system of intern control and the control of regional finance. The writer wanted to know the effect those factors to the value of government financial report information. To test this hypothesis, the writer used primary data. The techniques analysis of data used path analysis with the system of intern control as exogenous variable and the the control of regional finance as an intervening variable. After the data was analyzed, it found that all of the factors have a significantly give positive influence to the value of government financial report information. It means, if the system of intern control and the control of regional finance the better than before, the information and financial report which produced by the government will be better also. It is recommended to the local government to do a review about the system of intern control and the control of regional finance to make financial report so it has information value.

Key words: *information value, the system of intern control, the control of regional finance.*

1. Pendahuluan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Untuk itu, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang

baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi.

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan

mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412). Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait yang akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009 Kota Bukittinggi, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti tidak ada peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008. Pada tahun

2010 opini audit LKPD kota Bukittinggi tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2011 juga masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah, lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan, dan sistem informasi keuangan penyampaian LKPD. (BPK RI Provinsi Sumatera Barat).

2. Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
- b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)

- c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
- d. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
- e. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
- f. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

- a. Relevan
yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal

yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah yang meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung

terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.

Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan

daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ruang lingkungannya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung-jawaban APBD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Ahmad (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- a. Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- b. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- c. Struktur APBD,
- d. Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- e. Penyusunan dan penetapan APBD,
- f. Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- g. Penatausahaan keuangan daerah,
- h. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- i. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- j. Pengelolaan kas umum negara,
- k. Pengelolaan piutang daerah,
- l. Pengelolaan investasi daerah,
- m. Pengelolaan barang milik negara,
- n. Pengelolaandana cadangan,
- o. Pengelolaan utang daerah,
- p. Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- q. Penyelesaian kerugian daerah,
- r. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
- s. Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah,

efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian Dita Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Ariska (2008) menyatakan, bahwa fungsi pengawasan keuangan daerah yang dijalankan terhadap output berupa laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan meliputi proses yakni (1) Menetapkan beberapa standar atau tolak ukur, (2) Penetapan waktu dan frekuensi, (3) Mengadakan penilaian dan perbandingan, (4) Ketentuan serta kebijakan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik sebagai salah satu tolak ukur kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya nilai informasi laporan keuangan dari pemerintah, karena masih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan dan penerapan pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkap keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah harus memadai dan pengawasan keuangan daerah yang layak di pemerintahan Kota Bukittinggi.

Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang

berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern adalah penilaian risiko serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian intern akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang didapatkan.

Pengawasan keuangan daerah pemerintah adalah pengawasan keuangan daerah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah

daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik.

Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan.

Gambar 1

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
- H₂: Pengawasan keuangan daerah Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.
- H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

Pemerintah melalui Pengawasan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bukittinggi berjumlah 29 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf akuntansi pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. Jumlah responden 87 Responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel antara lain:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

2. Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1)
3. Variabel Intervening dalam penelitian ini adalah Pengawasan Keuangan Daerah (X_2).

Pengukuran Variabel dan Instrumen Penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji pendahuluan terhadap kuesioner. Untuk uji validitas, maka digunakan rumus korelasi *Product Moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum Y)(\sum X)}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

n = Besar sampel

x = Variabel Bebas (X_1, X_2)

y = Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi

Dari *print out* SPSS versi 16.0 dapat dilihat dari *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, selanjutnya akan dilakukan pengujian reliabilitas, yang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma^2 t} \right]$$

Dimana:

- r = Reliabilitas Instrumen
k = Banyak butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir
 $\sigma^2 t$ = Varian total

Cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* menurut Sekaran (2003:205) dengan kriteria sebagai berikut:

- Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- 0,6 – 0,7 akseptabel
- 0,7 – 0,8 baik
- Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal.
- Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan metode *Spearman Correlations*. Apabila nilai koefisien korelasi spearman $> 0,05$, dan nilai signifikansinya $< 0,05$ berarti varian data untuk semua variabel adalah homogen, atau varian data populasi dari semua data sampel yang diambil homogen.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung Nilai Jawaban

- Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan
- Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus:

$$\frac{5SS+4S+3R+2TS+1STS}{15}$$

Dimana:

- SS = Sangat Setuju
S = Setuju
R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju

- Menghitung nilai rerata jawaban responden.

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n xi}{n}$$

Keterangan :

- Xi = Skor total
N = Jumlah responden

- 4) Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel.

Dengan rumus:

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

Keterangan :

TCR= Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban

n = Nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

(a) Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik

(b) Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik

(c) Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

2. Pengujian Model

Untuk dapat menganalisis seberapa besar suatu variabel penyebab mempengaruhi variabel akibat maka analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Diagram jalur merupakan sebuah struktur yang lengkap dari hubungan kausal antar variabel, yang terdiri dari hubungan substruktur yang menyerupai struktur regresi.

Struktur diagram jalur pada penelitian ini dapat dipecah menjadi 2 sub struktur:

a. Sub struktur 1 pengaruh tidak langsung

Dengan persamaan jalur sebagai berikut:

$$X_1 = P_{X_2 X_1} X_2 + \epsilon_1$$

b. Sub struktur 2 pengaruh langsung

Dengan persamaan jalur sebagai berikut:

$$Y = P_{Y X_1} X_1 + P_{Y X_2} X_2 + \epsilon_2$$

Maka berdasarkan sub struktur ini, besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien jalur dengan simbol:

$$P_{Y X_2} = b_{Y X_2} \sqrt{\frac{\sum_{h=1}^n X_{ih}^2}{\sum_{h=1}^n Y_h^2}} ; = 1, 2, \text{ dan } 3$$

Keterangan:

$P_{Y X_i}$ =koefisien jalur variabel X_i terhadap Y

$b_{Y X_i}$ =koefisien regresi variabel X_i terhadap Y

Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel lain (ϵ) dapat ditentukan dengan rumus :

$$P_{Y \epsilon} = \sqrt{1 - R_{Y X_1 X_2}^2}$$

Adapun pengaruh suatu variabel secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengaruh langsung

$$X_1 \quad Y \longrightarrow \text{Persamaan } P_{Y X_1} \cdot P_{Y X_1}$$

$$X_2 \quad Y \longrightarrow \text{Persamaan } P_{Y X_2} \cdot P_{Y X_2}$$

2) Pengaruh tidak langsung

$$X_1 \quad Y \text{ melalui } X_2 \longrightarrow \text{Persamaan } P_{Y X_1} \cdot P_{X_2 X_1} \cdot P_{Y X_2}$$

Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis jalur modelnya sudah *fit* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel endogen dan variabel eksogen secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fit*. Rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

(Gujarati, 1999:120)

Keterangan:

F = Uji F

R^2 = Koefisien determinan

k = Jumlah variabel bebas
n = Jumlah Sampel

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *adjusted R²* yaitu:

$$AdjustedR^2 = 1 - \left(-R^2 \left[\frac{N-1}{N-k} \right] \right)$$

Dari rumus di atas jelas bahwa:

- 1) Kalau $k > 1$ maka *adjusted R²* < R^2 , yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil daripada R^2 .
- 2) *Adjusted R²* dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

Uji Hipotesis (t-Test)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test* dengan rumus :

$$t - Test = \frac{\beta_n}{S\beta_n}$$

keterangan:

t = Nilai mutlak untuk pengujian

β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

S β_n = Standar *error* masing-masing variabel

Dengan kriteria pengujian :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak.

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dan koefisien positif dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi > 0,05 berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.

Definisi Operasional

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).
3. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah dua puluh

sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Setiap sampel masing-masing terdiri dari tiga responden. Dari dua puluh sembilan sampel tersebut, disebarkan sebanyak 87 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 69 kuisisioner. Kuisisioner kembali yang tidak sesuai dengan kriteria dimaksudkan berjumlah 2 buah. Dengan demikian kuisisioner yang dapat diolah adalah sebanyak 67 kuisisioner.

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas intrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Dapat dilihat pada **Tabel 1**

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbach's Alpha yang terdapat pada Tabel 4.11 di atas yaitu untuk instrumen nilai informasi laporan keuangan pemerintah 0,875, sistem pengendalian intern pemerintah 0,882 dan pengawasan keuangan daerah 0,725. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran di atas 0,70. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisisioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 67$, adalah **0,203**. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel Y, X_1 , dan X_2 semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa

seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , dan Y adalah valid.

Dari **Tabel 2** di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen nilai informasi laporan keuangan diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,366. Sistem pengendalian intern pemerintah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,601, dan Pengawasan keuangan daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,282.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof Smirnov (KS)*, dengan melihat perbandingan nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Dari **Tabel 3** di bawah ini terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,655 dengan signifikansi 0,785. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikansi dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Homogenitas

Pengujian ini dilakukan dengan metode *Spearman Correlations*. Berdasarkan **Tabel 4** dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi spearman untuk masing-masing variabel Y (nilai informasi laporan keuangan), X_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), X_2 (pengawasan keuangan daerah) $> \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa varian data untuk semua variabel adalah homogen,

atau varian data populasi dari semua data sampel yang diambil homogen.

Uji Model

Untuk dapat menganalisis seberapa besar suatu variabel penyebab mempengaruhi variabel akibat maka analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Struktur diagram jalur dalam penelitian ini kemudian dipecah menjadi 2 sub struktur:

1. Sub struktur I

Sub struktur I dalam penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pengawasan keuangan daerah. Sehingga dapat dilihat pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah. Berikut hasil pengolahan data pada sub struktur I. Berikut hasil pengolahan data pada sub struktur I dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Dari pengujian dapat diketahui pengaruh variabel lain (P_{Y_1}) adalah:

$$P_{Y_1} = \sqrt{1-0,436} = 0,7509 = 75,09\%$$

Sehingga persamaan jalurnya adalah:

$$X_2 = 0,660 X_1 + 0,7509$$

Dari **Tabel 6** di atas juga terlihat bahwa variabel X_1 mempunyai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya signifikan dan model tersebut baik untuk diteliti.

2. Sub struktur II

Sub struktur II dalam penelitian ini menguji pengaruh langsung sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Berikut hasil pengolahan data pada sub struktur II pada **Tabel 7**.

Dari pengujian dapat diketahui pengaruh variabel lain (P_{Y_2}) adalah:

$$P_{Y_2} = \sqrt{1-0,560} = 0,6633 = 66,33\%$$

Sehingga persamaan jalurnya adalah:

$$Y = 0,500X_1 + 0,317X_2 + 0,6633$$

Dari **Tabel 8** di atas terlihat bahwa variabel X_1 dan X_2 mempunyai tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya telah signifikan dan model tersebut telah baik untuk diteliti.

Uji F (F-Test)

Dari **Tabel 9** di atas, hasil pemrosesan data menunjukkan hasil sebesar 40,687 yang signifikan pada 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan jalur yang diperoleh dapat diandalkan atau model sudah *fit* sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara individual.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian seperti terlihat pada **Tabel 10** di atas menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,546. Hal ini berarti, kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen adalah sebesar 54,6 %, sedangkan sisanya 45,4% ditentukan oleh variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model penelitian ini.

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dalam Penelitian

Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap variabel akibat adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Langsung X_1 ke Y

$$X_1 \rightarrow Y = (P_{YX1}) (P_{YX1})$$

$$= (0,500) (0,500)$$

$$= 0,25 = 25\%$$

2) Pengaruh Tidak Langsung

$$X_2 \rightarrow Y = (P_{YX2}) (P_{YX2})$$

$$= (0,317) (0,317)$$

$$= 0,10048 = 10,05\%$$

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y = (P_{YX1}) (P_{X2X1}) (P_{YX2})$$

$$= (0,500) (0,660) (0,317)$$

$$= 0,1046 = 10,46\%$$

Dari **Tabel 11** di atas, ringkasan rekapitulasi dapat dilihat bahwa pengaruh Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah secara langsung adalah 25,00%. pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah secara langsung adalah 10,05%. Sedangkan pengaruh variabel sistem pengendalian intern pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah 10,46%.

Jadi total pengaruh langsung dan tidak langsung dalam penelitian ini adalah 45,51% sedangkan sisanya 66,33% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1) Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang dilakukan dengan pengujian statistik.

Dari **Tabel 8** di atas, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,530 > 1,668$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dan kesimpulannya **hipotesis 1 diterima**.

2) Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh langsung pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan

pemerintah yang dilakukan dengan pengujian statistik.

Dari **Tabel 8** di atas, sub struktur 2 dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,867 > 1,668$ dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dan kesimpulannya **hipotesis 2 diterima**.

3) Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah.

Sebuah hipotesis diterima dapat dilihat dari hasil pengolahan data penelitian pada tabel koeficient sub struktur I, (1) $t_{hitung} > t_{tabel}$, (2) signifikansi $<$ dari alpha, dan (3) arah pada kolom beta harus positif sesuai dengan hipotesis.

Dari **Tabel 6** di atas juga terlihat bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) mempunyai tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,088 > 1,668$ terhadap pengawasan keuangan daerah (X_2) sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien jalurnya signifikan. Sedangkan dari tabel 4.18 di atas, dapat dilihat bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,530 > 1,668$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif

terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan ringkasan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung pada tabel 4.21 di atas, maka dapat dilihat pengaruh langsung sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) terhadap nilai informasi laporan keuangan (Y) adalah 25,00%. Pengaruh pengawasan keuangan daerah (X_2) terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah (Y) adalah 10,05% dengan total hubungan langsung adalah 35,05%. Sedangkan pengaruh tidak langsung sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) terhadap nilai informasi laporan keuangan (Y) melalui pengawasan keuangan daerah (X_2) adalah 10,46%, dan jadi total pengaruh langsung dan tidak langsungnya adalah 45,51%. Jadi sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan melalui pengawasan keuangan daerah, maka **hipotesis 3 diterima**.

F. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif.

Pengaruh antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar laporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Pengendalian intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari ke-andalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada Tabel 4.9, variabel sistem pengendalian intern pemerintah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item

pernyataan yang TCR-nya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kota Bukittinggi, dimana pernyataannya indikator SKPD tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaian, Pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah adalah semakin baik pengawasan keuangan daerah maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua

proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fikri (2011), pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 4.10, variabel pengawasan keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCR-nya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kota Bukittinggi, dimana pernyataannya “Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah”. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyusun APBD ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memperhatikan perencanaan daerah maka anggaran yang akan digunakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Secara Tidak Langsung Melalui Pengawasan Keuangan Daerah

Dari hasil pengolahan data disimpulkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai

informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan teori Arens (2003), pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah merupakan salah satu komponen pengendalian intern pemerintah yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian intern pemerintah oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk pengawasan dalam sistem pengendalian intern

pemerintah yaitu adanya pemeriksaan mendadak oleh pimpinan, baik pimpinan SKPD maupun pimpinan daerah terhadap kinerja bawahan agar laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai nilai informasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.

Penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pengawasan Keuangan Daerah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana dari model penelitian yang

digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 45,51% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada aspek pencatatan jurnal penyesuaian, karena untuk indikator, SKPD kota bukitinggi tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya memperoleh tingkat capaian responden terendah.

Pengawasan keuangan daerah juga telah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah karena pada indikator Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah memperoleh tingkat capaian responden terendah. Penelitian ini masih terbatas pada sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Untuk penelitian

selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Arfianti, Dita. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariska, Dewi. 2008. Pengawasan Keuangan Daerah di Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro
- Atika, Ratih. 2010. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta: BPFE

Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Media Indonesia. 9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah

Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap

Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangandan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Wild, John.J.Subramanyam & Robert F.Halsey. 2005. *Financial Statement Anlysis*. Salemba Empat: Jakarta

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers

Dokumen dan Literatur Penunjang

Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

_____, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Melalui
<http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 105 Tahun
2000 Tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah. Melalui
<http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 56 Tahun
2005 Tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah. Melalui
<http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 60 Tahun
2008 Tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Melalui
<http://www.google.com> [29/11/2011]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui <http://www.google.com>
[29/11/2011]

_____, No. 51 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Melalui <http://www.google.com>
[29/11/2011]

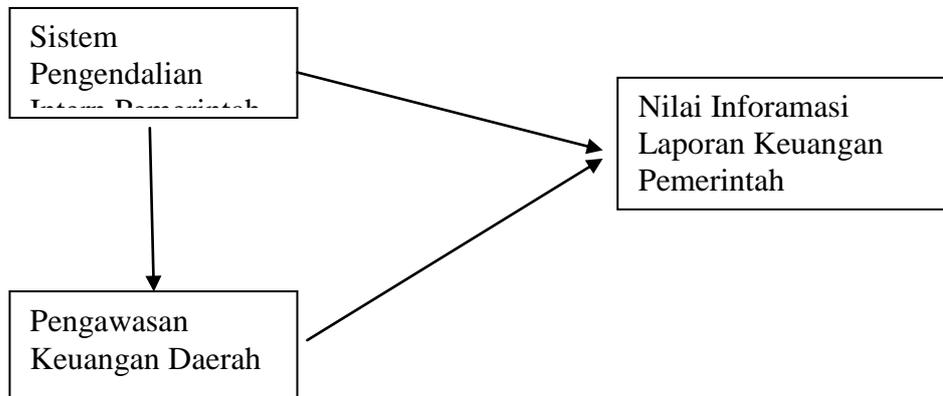
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara. Melalui
<http://www.google.com> [29/11/2011]

_____, Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.
Melalui <http://www.google.com>
[29/11/2011]

_____, Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.
Melalui (www.google.com)
[07/12/2010]

Lampiran

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Tabel 1 Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach's Alpha
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,875
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1)	0,882
Pengawasan Keuangan Daerah (X_2)	0,725

Tabel 2 Uji Validitas

Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil

Instrumen Variabel	Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil
Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y)	0,366
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_1)	0,601
Pengawasan Keuangan Daerah (X_2)	0,282

Tabel 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		67
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,38067569
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,053
Kolmogorov-Smirnov Z		,655
Asymp. Sig. (2-tailed)		,785

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4 Uji Homogenitas

Correlations

		Y	X1	X2
Spearman's rho	Y	1,000	,672**	,624**
	Correlation Coefficient			
	Sig. (1-tailed)	.	,000	,000
	N	67	67	67
X1	Correlation Coefficient	,672**	1,000	,650**
	Sig. (1-tailed)	,000	.	,000
	N	67	67	67
X2	Correlation Coefficient	,624**	,650**	1,000
	Sig. (1-tailed)	,000	,000	.
	N	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Tabel 5 Uji Model Sub Struktur I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,660(a)	,436	,427	1,99304	1,950

a Predictors: (Constant), X1

b Dependent Variable: X2

Tabel 6 Koefisien Regresi Sub Struktur I

Coefficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	12,320	3,060		4,026	,000
	X1	,500	,071	,660	7,088	,000

a Dependent Variable: X2

Tabel 7 Uji Model Sub Struktur II

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,748(a)	,560	,546	2,41759	2,241

a Predictors: (Constant), X2, X1

b Dependent Variable: y

Tabel 8 Uji Regresi Sub Struktur II

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	5,412	4,149		1,305	,197
	X1	,517	,114	,500	4,530	,000
	X2	,431	,150	,317	2,867	,006

a Dependent Variable: y

Tabel 9 Uji F Statistik

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	475,609	2	237,804	40,687	,000 ^a
	Residual	374,063	64	5,845		
	Total	849,672	66			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 10 Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,748 ^a	,560	,546	2,41759	2,241

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel 11 Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data

No	Keterangan	Pengaruh (%)
1	SPIP (X_1) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y)	25,00
	Pengaruh pengawasan keuangan daerah (X_2) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y)	10,05
	Total Pengaruh Langsung	35,05
2	Pengaruh SPIP (X_1) terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Y) secara tidak langsung melalui pengawasan keuangan daerah (X_2)	10,46
	Total Pengaruh Tidak Langsung	10,46
3	Total Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	45,51
4	Pengaruh Variabel Lain terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan	66,33
	Total	111,84